



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Katingan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Katingan.
6. Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.188.300.513.800,00 yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp102.452.285.800,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.096.000.000,00.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.524.400.000,00.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.331.885.800,00.

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.078.798.228.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.035.231.628.000,00.
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.566.600.000,00.

Pasal 6

- (1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp7.050.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000,00.
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00.

Pasal 7

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.242.714.345.380,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja operasional;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp927.965.875.570,39 yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp642.419.727.386,49
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp247.938.866.270,90
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.766.281.913,00.
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp341.000.000,00.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp113.201.064.039,61 yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset tidak terwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp240.000.000,00.
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.678.323.573,85
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.743.027.651,76
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.539.712.814,00
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00.
- (7) Belanja modal aset tidak terwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp199.547.405.770,00 yang terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.540.880.070,00

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp191.006.525.700,00

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp55.413.831.580,00.
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf b terdiri dari Penyertaan Modal Daerah yang direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(54.413.831.580,00).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp54.413.831.580,00.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan ini terdiri dari :

1. Lampiran I	Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II	Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V	Daftar Nama Penrima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
8. Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

9. Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
10. Lampiran X	Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Katingan pada daerah perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 16

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 17

Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Katingan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kasongan,
pada tanggal 31 Desember 2025



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 31 Desember 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025 NOMOR 060



KABUPATEN KATINGAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	102.452.285.800,00
4.1.01	Pajak Daerah	57.096.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	300.000.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	300.000.000,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	300.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	25.000.000,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	25.000.000,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	25.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00
4.1.01.13.001	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00
4.1.01.13.001.00001	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.500.000.000,00
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.500.000.000,00
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	5.500.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.250.000.000,00
4.1.01.15.001	PBBP2	1.250.000.000,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	1.250.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	16.150.000.000,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.150.000.000,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.150.000.000,00
4.1.01.16.002	BPHTB-Pemberian Hak Baru	15.000.000.000,00
4.1.01.16.002.00001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	15.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	11.771.000.000,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.100.000.000,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	250.000.000,00
4.1.01.19.001.00002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	850.000.000,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	10.550.000.000,00
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	10.500.000.000,00
4.1.01.19.002.00002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	50.000.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	120.000.000,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	50.000.000,00
4.1.01.19.003.00006	PBJT-Losmen	70.000.000,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.005.00007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	9.000.000.000,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	9.000.000.000,00
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	9.000.000.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	13.000.000.000,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	13.000.000.000,00
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	13.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.524.400.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.215.000.000,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.000.000.000,00
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.000.000.000,00
4.1.02.01.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	125.000.000,00
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	125.000.000,00
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	85.000.000,00
4.1.02.01.004.00001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	85.000.000,00
4.1.02.01.005	Retribusi Pelayanan Pasar	5.000.000,00
4.1.02.01.005.00002	Retribusi Los	5.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.659.400.000,00
4.1.02.02.001	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.164.849.000,00
4.1.02.02.001.00001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	210.200.000,00
4.1.02.02.001.00002	Retribusi Penyewaan Tanah	419.000.000,00
4.1.02.02.001.00003	Retribusi Penyewaan Bangunan	493.100.000,00
4.1.02.02.001.00004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	395.000.000,00
4.1.02.02.001.00006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	510.000.000,00
4.1.02.02.001.00007	Retribusi Pemakaian Alat	137.549.000,00
4.1.02.02.002	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	688.050.000,00
4.1.02.02.002.00002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	688.050.000,00
4.1.02.02.005	Retribusi Tempat Khusus Parkir	60.000.000,00
4.1.02.02.005.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	60.000.000,00
4.1.02.02.008	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	35.000.000,00
4.1.02.02.008.00001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	35.000.000,00
4.1.02.02.009	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	382.376.000,00
4.1.02.02.009.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	382.376.000,00
4.1.02.02.011	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	229.125.000,00
4.1.02.02.011.00001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	154.125.000,00
4.1.02.02.011.00003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	75.000.000,00
4.1.02.02.019	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	100.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.019.00001	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	100.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	650.000.000,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	650.000.000,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	650.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.500.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.500.000.000,00
4.1.03.02.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.500.000.000,00
4.1.03.02.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	34.331.885.800,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	250.000.000,00
4.1.04.01.005	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	250.000.000,00
4.1.04.01.005.00071	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	250.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	600.000.000,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	600.000.000,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	600.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	100.000.000,00
4.1.04.07.001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	100.000.000,00
4.1.04.07.001.00001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	100.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	25.000.000,00
4.1.04.08.002	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	25.000.000,00
4.1.04.08.002.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	25.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	300.000.000,00
4.1.04.11.001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	300.000.000,00
4.1.04.11.001.00001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	300.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	7.041.885.800,00
4.1.04.15.008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.041.885.800,00
4.1.04.15.008.00002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK	7.041.885.800,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	26.000.000.000,00
4.1.04.16.002	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	25.938.000.000,00
4.1.04.16.002.00001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	25.938.000.000,00
4.1.04.16.004	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	42.000.000,00
4.1.04.16.004.00001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	42.000.000,00
4.1.04.16.006	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	20.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.16.006.00004	Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD	20.000.000,00
4.1.04.27	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	15.000.000,00
4.1.04.27.001	Pendapatan Denda Pajak Daerah	15.000.000,00
4.1.04.27.001.00122	Pendapatan Denda PBBP2	15.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.078.798.228.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.035.231.628.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	116.156.799.000,00
4.2.01.05.001	Dana Desa	116.156.799.000,00
4.2.01.05.001.00001	Dana Desa	116.156.799.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	61.548.929.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	10.146.306.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	8.111.395.000,00
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	2.034.911.000,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	46.340.448.000,00
4.2.01.07.002.00005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	36.406.916.000,00
4.2.01.07.002.00007	DBH SDA Kehutanan-Iuran izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	9.594.172.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	339.360.000,00
4.2.01.07.003	DBH Lainnya	5.062.175.000,00
4.2.01.07.003.00001	DBH Sawit	5.062.175.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	678.948.338.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	648.413.732.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	648.413.732.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	30.534.606.000,00
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	11.800.161.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	17.334.445.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	178.577.562.000,00
4.2.01.09.001	DAK Fisik	2.200.000.000,00
4.2.01.09.001.00060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	2.200.000.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	176.377.562.000,00
4.2.01.09.002.00002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	4.969.200.000,00
4.2.01.09.002.00004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	90.391.473.000,00
4.2.01.09.002.00005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	51.000.000,00
4.2.01.09.002.00006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	22.909.284.000,00
4.2.01.09.002.00011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.029.066.000,00
4.2.01.09.002.00012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	561.264.000,00
4.2.01.09.002.00013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	12.445.194.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.002.00015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	1.612.561.000,00
4.2.01.09.002.00022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	408.000.000,00
4.2.01.09.002.00026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	29.859.520.000,00
4.2.01.09.002.00027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	810.000.000,00
4.2.01.09.002.00028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.139.000.000,00
4.2.01.09.002.00029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	82.500.000,00
4.2.01.09.002.00030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	3.019.500.000,00
4.2.01.09.002.00031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	90.000.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.566.600.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	42.150.000.000,00
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	42.150.000.000,00
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	32.000.000.000,00
4.2.02.01.001.00004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	150.000.000,00
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.000.000.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	1.416.600.000,00
4.2.02.02.002	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	1.416.600.000,00
4.2.02.02.002.00001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.416.600.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.050.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	50.000.000,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	50.000.000,00
4.3.01.04.001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	50.000.000,00
4.3.01.04.001.00001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	50.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.000.000.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.000.000.000,00
4.3.03.02.001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.000.000.000,00
4.3.03.02.001.00001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.188.300.513.800,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	927.965.875.570,39
5.1.01	Belanja Pegawai	642.419.727.386,49
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	429.642.926.959,43
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	317.514.713.456,73
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	186.892.151.058,49
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	130.622.562.398,24
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	27.159.899.211,20
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	17.716.482.918,60
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.443.416.292,60

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.225.723.323,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.225.723.323,00
5.1.01.01.003.00002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.866.159.219,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.015.349.219,00
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.850.810.000,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.475.384.190,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.836.208.922,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.639.175.268,00
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	16.768.646.968,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	9.751.275.625,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.017.371.343,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	788.390.892,50
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	650.026.012,50
5.1.01.01.007.00002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	138.364.880,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	726.404.230,35
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	670.505.145,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	55.899.085,35
5.1.01.01.009	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	30.867.605.468,65
5.1.01.01.009.00001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	20.969.668.383,00
5.1.01.01.009.00002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	9.897.937.085,65
5.1.01.01.010	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	680.000.000,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	380.000.000,00
5.1.01.01.010.00002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	300.000.000,00
5.1.01.01.011	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.820.000.000,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.135.000.000,00
5.1.01.01.011.00002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	685.000.000,00
5.1.01.01.012	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.750.000.000,00
5.1.01.01.012.00001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.100.000.000,00
5.1.01.01.012.00002	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	650.000.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	196.314.328.727,06
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	72.192.254.867,46
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	53.010.428.305,26
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	19.181.826.562,20
5.1.01.02.002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	1.000.000.000,00
5.1.01.02.002.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	1.000.000.000,00
5.1.01.02.003	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.595.316.859,60

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	4.303.316.859,60
5.1.01.02.003.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	292.000.000,00
5.1.01.02.004	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	5.175.000.000,00
5.1.01.02.004.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	4.450.000.000,00
5.1.01.02.004.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	725.000.000,00
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	113.351.757.000,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	90.391.473.000,00
5.1.01.02.006.00065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	22.909.284.000,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	51.000.000,00
5.1.01.02.006.00069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	14.149.511.700,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	85.834.000,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	85.834.000,00
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.688.000,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	86.688.000,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	48.200.000,00
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	48.200.000,00
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	835.254.000,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	835.254.000,00
5.1.01.04.006	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	89.190.000,00
5.1.01.04.006.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	89.190.000,00
5.1.01.04.007	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.625.700,00
5.1.01.04.007.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.625.700,00
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00
5.1.01.04.011	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	0,00
5.1.01.04.011.00001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	0,00
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.879.020.000,00
5.1.01.04.012.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	231.520.000,00
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	3.000.000,00
5.1.01.04.012.00003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.500.000,00
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.640.000.000,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.794.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.794.000.000,00
5.1.01.04.014	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	240.660.000,00
5.1.01.04.014.00001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	240.660.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	500.000.000,00
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	98.000.000,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	98.000.000,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	70.000.000,00
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	70.000.000,00
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	14.000.000,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	14.000.000,00
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	30.000.000,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	30.000.000,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.720.000,00
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.720.000,00
5.1.01.05.007	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	19.699.372,00
5.1.01.05.007.00001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	19.699.372,00
5.1.01.05.008	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	64.300.628,00
5.1.01.05.008.00001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	64.300.628,00
5.1.01.05.009	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	100.000.000,00
5.1.01.05.009.00001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	100.000.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	712.480.000,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.89	Belanja Pegawai BOSP	1.010.480.000,00
5.1.01.89.003	Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan	1.010.480.000,00
5.1.01.89.003.00001	Belanja Pegawai BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.010.480.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	90.000.000,00
5.1.01.99.099	Belanja Pegawai BLUD	90.000.000,00
5.1.01.99.099.09999	Belanja Pegawai BLUD	90.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.938.866.270,90
5.1.02.01	Belanja Barang	41.655.038.621,92
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	38.581.370.871,92
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.611.078.976,20

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	217.075.271,24
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.301.846.222,00
5.1.02.01.001.00008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	80.850.000,00
5.1.02.01.001.00009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	219.799.082,00
5.1.02.01.001.00011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	564.000.000,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	938.906.600,00
5.1.02.01.001.00023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.458.689.309,60
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.477.373.790,27
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	379.321.863,98
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	313.330.530,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.464.774.987,54
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	779.950.397,07
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	37.106.562,50
5.1.02.01.001.00034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	200.000.000,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	41.178.500,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.265.713.696,00
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.113.389.550,50
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	107.035.500,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.635.519.443,00
5.1.02.01.001.00040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	11.850.000,00
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.626.821.534,02
5.1.02.01.001.00044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	299.442.500,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.630.345.454,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.118.449.000,00
5.1.02.01.001.00054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	169.104.000,00
5.1.02.01.001.00056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	257.680.000,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.192.156.900,00
5.1.02.01.001.00060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	355.000.000,00
5.1.02.01.001.00063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	59.000.000,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	92.300.500,00
5.1.02.01.001.00068	Belanja Pakaian Siaga	0,00
5.1.02.01.001.00070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	3.600.000,00
5.1.02.01.001.00073	Belanja Pakaian KORPRI	0,00
5.1.02.01.001.00074	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00
5.1.02.01.001.00075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	71.580.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00076	Belanja Pakaian Olahraga	349.275.000,00
5.1.02.01.001.00077	Belanja Pakaian Paskibraka	110.847.500,00
5.1.02.01.001.00079	Belanja Barang Sampel Pangan	26.978.202,00
5.1.02.01.002	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00
5.1.02.01.002.00004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	0,00
5.1.02.01.004	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	3.073.667.750,00
5.1.02.01.004.00118	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	6.000.000,00
5.1.02.01.004.00510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.017.707.750,00
5.1.02.01.004.00517	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	999.960.000,00
5.1.02.01.004.00518	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	74.123.805.691,66
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	43.584.567.992,66
5.1.02.02.001.00001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	63.600.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	703.873.000,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	120.426.500,00
5.1.02.02.001.00005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	50.400.000,00
5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	95.800.000,00
5.1.02.02.001.00008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	180.000,00
5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	85.000.000,00
5.1.02.02.001.00013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.300.000.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.385.952.000,00
5.1.02.02.001.00015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	145.530.000,00
5.1.02.02.001.00016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	506.728.387,00
5.1.02.02.001.00017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	26.400.000,00
5.1.02.02.001.00020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.159.200.000,00
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	108.650.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.399.300.000,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	451.035.200,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	33.400.000,00
5.1.02.02.001.00035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0,00
5.1.02.02.001.00036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	50.000.000,00
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	43.550.000,00
5.1.02.02.001.00038	Belanja Jasa Tata Rias	10.000.000,00
5.1.02.02.001.00041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	40.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	7.246.183.462,70
5.1.02.02.001.00046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	954.488.584,00
5.1.02.02.001.00048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	45.000.000,00
5.1.02.02.001.00049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	37.990.400,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	52.640.000,00
5.1.02.02.001.00051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.404.908.352,00
5.1.02.02.001.00052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	234.270.000,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	7.832.200.000,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	140.932.750,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	212.589.414,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	6.246.992.520,95
5.1.02.02.001.00062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	142.401.500,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.120.236.482,00
5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	16.400.000,00
5.1.02.02.001.00065	Belanja Penambahan Daya	478.050.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	785.021.050,01
5.1.02.02.001.00068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	2.772.225.000,00
5.1.02.02.001.00071	Belanja Lembur	57.013.390,00
5.1.02.02.001.00079	Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan	100.000.000,00
5.1.02.02.001.00084	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kependidikan	730.000.000,00
5.1.02.02.001.00085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	78.400.000,00
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	78.400.000,00
5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	39.200.000,00
5.1.02.02.002	Belanja luran Jaminan/Asuransi	21.620.695.248,00
5.1.02.02.002.00001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.704.500.000,00
5.1.02.02.002.00004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	8.800.000.000,00
5.1.02.02.002.00005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	360.000.000,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	312.975,00
5.1.02.02.002.00007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	391.248,00
5.1.02.02.002.00009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	8.339.516.625,00
5.1.02.02.002.00012	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	1.438.080.000,00
5.1.02.02.002.00013	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	977.894.400,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	933.658.740,00
5.1.02.02.004.00012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	2.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	418.749.500,00
5.1.02.02.004.00037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.500.000,00
5.1.02.02.004.00049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	389.167.000,00
5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	45.242.240,00
5.1.02.02.004.00132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	76.500.000,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.138.330.000,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	300.960.000,00
5.1.02.02.005.00032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	0,00
5.1.02.02.005.00033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	14.100.000,00
5.1.02.02.005.00036	Belanja Sewa Taman	18.110.000,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	529.660.000,00
5.1.02.02.005.00049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	275.500.000,00
5.1.02.02.007	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	15.900.000,00
5.1.02.02.007.00028	Belanja Sewa Alat Musik	0,00
5.1.02.02.007.00035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	15.900.000,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.445.000.000,00
5.1.02.02.008.00032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.410.000.000,00
5.1.02.02.008.00033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	35.000.000,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.225.000.000,00
5.1.02.02.009.00001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0,00
5.1.02.02.009.00003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	100.000.000,00
5.1.02.02.009.00006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan	150.000.000,00
5.1.02.02.009.00011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	800.000.000,00
5.1.02.02.009.00012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000,00
5.1.02.02.009.00014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	75.000.000,00
5.1.02.02.010	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	24.000.000,00
5.1.02.02.010.00002	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Jalan	24.000.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.036.653.711,00
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	3.218.633.711,00
5.1.02.02.012.00004	Belanja Diklat Kepemimpinan	818.020.000,00
5.1.02.02.013	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	100.000.000,00
5.1.02.02.013.00015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	100.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.382.948.449,99
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.926.353.278,99
5.1.02.03.002.00012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	60.000.000,00
5.1.02.03.002.00022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	37.943.400,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.320.125.913,99
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.948.125.150,00
5.1.02.03.002.00037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	386.315.100,00
5.1.02.03.002.00039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.500.000,00
5.1.02.03.002.00049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	63.148.800,00
5.1.02.03.002.00068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	25.000.000,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	21.000.000,00
5.1.02.03.002.00118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	4.940.000,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	602.070.020,00
5.1.02.03.002.00123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00
5.1.02.03.002.00125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0,00
5.1.02.03.002.00127	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	800.000,00
5.1.02.03.002.00132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00
5.1.02.03.002.00133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	19.300.000,00
5.1.02.03.002.00137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	0,00
5.1.02.03.002.00196	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	3.600.000,00
5.1.02.03.002.00237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	738.500.000,00
5.1.02.03.002.00347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	30.000.000,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	323.721.400,00
5.1.02.03.002.00409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	190.263.495,00
5.1.02.03.002.00410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	150.000.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	908.195.171,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	877.995.171,00
5.1.02.03.003.00010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.200.000,00
5.1.02.03.003.00036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	24.000.000,00
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	548.400.000,00
5.1.02.03.004.00003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	400.000.000,00
5.1.02.03.004.00010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.03.004.00079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	48.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.004.00126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	47.861.249.181,33
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.861.249.181,33
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.590.323.600,50
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.117.431.710,83
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.710.431.000,00
5.1.02.04.001.00005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	443.062.870,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.203.900.000,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.099.100.000,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	183.100.000,00
5.1.02.05.001.00005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	2.916.000.000,00
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	104.800.000,00
5.1.02.05.002.00001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	104.800.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	39.433.225.000,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	34.731.520.000,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	29.859.520.000,00
5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	4.872.000.000,00
5.1.02.89.002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	3.091.500.000,00
5.1.02.89.002.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	2.139.000.000,00
5.1.02.89.002.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	952.500.000,00
5.1.02.89.003	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	1.610.205.000,00
5.1.02.89.003.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.483.005.000,00
5.1.02.89.003.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	127.200.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.188.699.326,00
5.1.02.90.001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.188.699.326,00
5.1.02.90.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	8.188.699.326,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.090.000.000,00
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.090.000.000,00
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	25.090.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.500.000.000,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.400.000.000,00
5.1.04.02.002	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.400.000.000,00
5.1.04.02.002.00001	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.400.000.000,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	100.000.000,00
5.1.04.03.001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	100.000.000,00
5.1.04.03.001.00001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	100.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	35.766.281.913,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.316.730.000,00
5.1.05.01.001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.316.730.000,00
5.1.05.01.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.316.730.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	34.332.576.913,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.720.000.000,00
5.1.05.05.001.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.720.000.000,00
5.1.05.05.002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	22.988.684.080,00
5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	20.495.000.000,00
5.1.05.05.002.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.493.684.080,00
5.1.05.05.003	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.473.892.833,00
5.1.05.05.003.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	325.000.000,00
5.1.05.05.003.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.148.892.833,00
5.1.05.05.006	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150.000.000,00
5.1.05.05.006.00001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	150.000.000,00
5.1.05.11	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro	38.750.000,00
5.1.05.11.002	Belanja Hibah Barang kepada Usaha Mikro	38.750.000,00
5.1.05.11.002.00001	Belanja Hibah Barang kepada Usaha Mikro	38.750.000,00
5.1.05.12	Belanja Hibah kepada Usaha Kecil	78.225.000,00
5.1.05.12.002	Belanja Hibah Barang kepada Usaha Kecil	78.225.000,00
5.1.05.12.002.00001	Belanja Hibah Barang kepada Usaha Kecil	78.225.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	341.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00
5.1.06.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00
5.1.06.01.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	125.000.000,00
5.1.06.02.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	125.000.000,00
5.1.06.02.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	125.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	60.000.000,00
5.1.06.03.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	60.000.000,00
5.1.06.03.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	60.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	156.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.06.04.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	156.000.000,00
5.1.06.04.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	156.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	113.201.064.039,61
5.2.01	Belanja Modal Tanah	240.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	240.000.000,00
5.2.01.01.001	Belanja Modal Tanah Persil	240.000.000,00
5.2.01.01.001.00007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	240.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.678.323.573,85
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.918.490.627,00
5.2.02.01.001	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.500.000.000,00
5.2.02.01.001.00003	Belanja Modal Excavator	1.500.000.000,00
5.2.02.01.003	Belanja Modal Alat Bantu	418.490.627,00
5.2.02.01.003.00004	Belanja Modal Electric Generating Set	400.575.002,00
5.2.02.01.003.00005	Belanja Modal Pompa	17.915.625,00
5.2.02.01.003.00006	Belanja Modal Mesin Bor	0,00
5.2.02.01.003.00008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.301.183.000,00
5.2.02.02.001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.301.183.000,00
5.2.02.02.001.00003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	510.000.000,00
5.2.02.02.001.00004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.583.000,00
5.2.02.02.001.00006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.750.600.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	35.696.338,14
5.2.02.03.001	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	32.745.000,00
5.2.02.03.001.00003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0,00
5.2.02.03.001.00010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	32.745.000,00
5.2.02.03.003	Belanja Modal Alat Ukur	2.951.338,14
5.2.02.03.003.00021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	2.951.338,14
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.844.878.146,64
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	145.417.218,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	145.417.218,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.671.332.084,89
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	2.772.160.077,75
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	724.400.904,76
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	174.771.102,38
5.2.02.05.003	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	28.128.843,75
5.2.02.05.003.00001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	19.678.968,75

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.05.003.00003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	8.449.875,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.044.475.477,00
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	3.024.975.477,00
5.2.02.06.001.00001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	27.997.472,00
5.2.02.06.001.00002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.995.278.005,00
5.2.02.06.001.00003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	1.700.000,00
5.2.02.06.002	Belanja Modal Alat Komunikasi	19.500.000,00
5.2.02.06.002.00011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	19.500.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00
5.2.02.07.002	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00
5.2.02.07.002.00005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.387.584.985,07
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	2.000.890.475,50
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	2.000.890.475,50
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	386.694.509,57
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	385.894.509,57
5.2.02.10.002.00004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	800.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00
5.2.02.15.002	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00
5.2.02.15.002.00006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00
5.2.02.15.003	Belanja Modal Alat SAR	0,00
5.2.02.15.003.00004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00
5.2.02.18.001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00
5.2.02.18.001.00002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	0,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	526.015.000,00
5.2.02.89.003	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	526.015.000,00
5.2.02.89.003.00001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	521.855.000,00
5.2.02.89.003.00002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	4.160.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	620.000.000,00
5.2.02.99.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	620.000.000,00
5.2.02.99.099.09999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	620.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.743.027.651,76
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	46.138.927.651,76
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	46.138.927.651,76
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	16.646.736.406,76
5.2.03.01.001.00002	Belanja Modal Bangunan Gudang	388.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.001.00006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	3.099.554.798,00
5.2.03.01.001.00008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.135.300.000,00
5.2.03.01.001.00009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	510.599.697,00
5.2.03.01.001.00010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.934.742.290,00
5.2.03.01.001.00011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	148.000.000,00
5.2.03.01.001.00012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	7.548.400.460,00
5.2.03.01.001.00025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	1.000.000.000,00
5.2.03.01.001.00029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00
5.2.03.01.001.00030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	627.594.000,00
5.2.03.01.001.00037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00
5.2.03.01.002	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00
5.2.03.01.002.00001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	0,00
5.2.03.01.002.00003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	0,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	0,00
5.2.03.02.001	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00
5.2.03.02.001.00004	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	404.100.000,00
5.2.03.04.001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	404.100.000,00
5.2.03.04.001.00004	Belanja Modal Pagar	404.100.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00
5.2.03.99.099	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00
5.2.03.99.099.09999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	200.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.539.712.814,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	45.213.807.614,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	44.697.682.614,00
5.2.04.01.001.00003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	43.506.682.614,00
5.2.04.01.001.00004	Belanja Modal Jalan Kota	400.000.000,00
5.2.04.01.001.00005	Belanja Modal Jalan Desa	791.000.000,00
5.2.04.01.002	Belanja Modal Jembatan	516.125.000,00
5.2.04.01.002.00003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	67.500.000,00
5.2.04.01.002.00005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	448.625.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	4.700.000.000,00
5.2.04.02.001	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.420.000.000,00
5.2.04.02.001.00006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	4.420.000.000,00
5.2.04.02.006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	100.000.000,00
5.2.04.02.006.00003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	100.000.000,00
5.2.04.02.007	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	180.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.007.00001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	180.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	582.615.200,00
5.2.04.03.001	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	582.615.200,00
5.2.04.03.001.00005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	582.615.200,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	43.290.000,00
5.2.04.04.002	Belanja Modal Jaringan Listrik	43.290.000,00
5.2.04.04.002.00003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	43.290.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	199.547.405.770,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.540.880.070,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.776.617.057,00
5.4.01.01.002	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	5.750.000.000,00
5.4.01.01.002.00001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	5.750.000.000,00
5.4.01.01.003	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	26.617.057,00
5.4.01.01.003.00001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	26.617.057,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.764.263.013,00
5.4.01.02.001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.764.263.013,00
5.4.01.02.001.00001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.764.263.013,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	191.006.525.700,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	191.006.525.700,00
5.4.02.05.001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00
5.4.02.05.001.00003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00
5.4.02.05.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	191.006.525.700,00
5.4.02.05.002.00004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	116.156.799.000,00
5.4.02.05.002.00005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	74.049.726.700,00
5.4.02.05.002.00050	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	800.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.242.714.345.380,00
	Total Surplus/(Defisit)	-54.413.831.580,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.413.831.580,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.413.831.580,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	55.413.831.580,00
6.1.01.07.001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	55.413.831.580,00
6.1.01.07.001.00001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	55.413.831.580,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00
6.2.02.02.001.00001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	54.413.831.580,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Katingan, 31 Desember 2025

Bupati

